

## Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan

Arie Frits Kawulur  
Universitas Negeri Manado

**Abstract:** *This Research aims to find out : Whether is the empowerment of fishermen community which done by government give positive impact to reducing poverty, and how to influence of the empowerment of fishermen community towards reducing poverty in south minahasa regency. This research used quantitative and qualitative descriptive methods and population is all of family are 720 fishermen. Sample is 10 % of 720 fishermen with proportional random sampling. The result of this research showed that the empowerment of fishermen community and reducing poverty in south minahasa regency have positive correlation and significant influence. The empowerment of fishermen program by government gave reducing poverty of fishermen if the fishermen could have managing efficiently and effectively. Fishermen in the group has been increasing the tools of fishermen as "giob" and "pajeko" can increasing his income and reducing the poverty.*

**Keywords:** *empowerment of community, reducing poverty*

Memperhatikan kondisi riil Indonesia, maka negara kita seharusnya "prime mover" ekonominya bertumpu pada sumber daya laut. Hal ini disebabkan karena garis pantainya kedua terpanjang di dunia setelah Kanada yang mencapai 81.000 kilometer. Namun sayang, sumbangan ekonomi sektor kelautan dan pesisirnya tersebut masih sangat rendah, karena baru menyumbang sekitar 21% terhadap PDB, dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki wilayah garis panjang pantai lebih kurang dari Indonesia. Misalnya Jepang yang luas garis pantainya hanya sekitar 31 ribuan km tapi telah menyumbang hampir 55% terhadap PDB (Marzuki, 2006).

Rokhmin Dahuri mengemukakan bahwa potensi perikanan dan kelautan sangatlah besar karena 2/3 luas wilayah Indonesia berupa laut. Luas laut Indonesia 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas 0,8 juta km<sup>2</sup> laut teritorial, 2,3 juta km<sup>2</sup> laut Nusantara, dan 2,7 juta km<sup>2</sup> laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

---

### Alamat Korespondensi:

Arie Frits Kawulur, Universitas Negeri Manado di Tondano, Sulawesi Utara

Jumlah pulau sekitar 17.500 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar tetapi juga menyimpan sumber daya laut baik secara kuantitas dan diversitas yang luar biasa. Selain potensi yang besar ternyata usaha di sektor perikanan dan kelautan tersebut juga efisien. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* sektor perikanan laut dan payau sebesar 3,42 yang berarti memiliki efisiensi yang relatif tinggi dibandingkan dengan usaha sektor lain. Begitu pula angka *Incremental labor Output Ratio (ILOR)* yang mencapai angka 7-9 yang berarti dapat menyerap banyak tenaga kerja. ([www.jateng.go.id](http://www.jateng.go.id)).

Dapat dikatakan bahwa selama ini perekonomian nasional lebih banyak berfokus pada hasil-hasil pembangunan di daratan dan sedikit perhatian pemerintah pada bidang kelautan, padahal negara kita disebut negara bahari. Di samping itu, pada kabinet sekarang ini, terdapat kementerian yang membidangi laut yaitu kementerian perikanan dan kelautan, namun sampai sekarang masih banyak masyarakat nelayan yang belum merasakan sentuhan-sentuhan manajemen, keuangan, dan teknologi yang dapat menaikkan kesejahteraan mereka.

Perairan laut Sulawesi Utara (Sulut) memiliki potensi produksi perairan teritorial sekitar 125.900 ton/tahun, sedangkan perairan ZEE memiliki potensi produksi sekitar 196.900 ton/tahun. Kenyataan para nelayan masih beroperasi pada perairan teritorial (12 mil) dengan pendapaian maksimal sebesar 53,27% atau 67.074 ton/tahun dari produksi lestari 125.900 ton/tahun. Dengan demikian masih terdapat potensi sumber daya laut (ikan) yang belum dimanfaatkan secara optimal diperairan teritorial maupun perairan ZEE. ([www.sulut.go.id](http://www.sulut.go.id)).

Pembangunan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari tiga nilai inti pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro Michael (1998) mengutip pendapat dari Profesor Goulet yang mengatakan nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan dalam hal kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar; Jati diri dalam hal menjadikan manusia seutuhnya; dan Kebebasan dalam hal menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan bebas dari sikap menghamba.

Pembangunan yang berbasis pada kerakyatan akan memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini Ismail Munawar (1995) mengemukakan bahwa dalam hal yang spesifik, penilaian terhadap keberhasilan dari pembangunan yang berbasis kerakyatan tidak hanya didasarkan pada tumbuh dan berkembangnya suatu ekonomi, tetapi juga didasarkan pada kemampuan pembangunan dalam memberikan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, pertumbuhan yang disertai dengan membaiknya pemerataan merupakan unsur inti dari pembangunan yang berdimensi kerakyatan.

Gambaran global tentang masyarakat dunia yang hidup dalam kemiskinan dan dalam kehidupan yang kaya sebagaimana digambarkan oleh Gunnar Mirdal (1976) bahwa keadaan negara yang miskin dan yang kaya dalam 3 (tiga) keadaan yaitu: (a) Di dunia ada sedikit jumlah negara-negara kaya dan banyak jumlahnya negara-negara miskin. (b) Negara-negara kaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan secara berkelanjutan, sedangkan negara-negara miskin pertumbuhan ekonominya sangat lambat, bahkan beberapa dari negara miskin ini mengalami stagnan;

dan (c) Perbedaan ekonomi antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin telah mengalami perluasan. Oleh sebab itu kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mengalami keterpurukan dan keterbelakangan.

Ketika berbicara kemiskinan dalam arti yang luas, maka kemiskinan adalah gejala multi dimensi yang bukan hanya dilihat dari dimensi ekonomi, tetapi harus dilihat dari dimensi-dimensi lain seperti: dimensi politik, sosial, psikologi. W.I.M. Poli dalam "Filsafat Ilmu Ekonomi" menguraikan kemiskinan dari sudut pandang dimensi-dimensi tersebut sebagai berikut:

- Dimensi Ekonomi yaitu keadaan mereka yang pendapatannya tidak lebih dari US\$ 370 per tahun (*lack of choice*). Dengan ukuran ini diperkirakan sekitar 1,3 miliar penduduk dunia kini berada dalam kemiskinan absolut/mutlak; artinya jumlahnya bertambah 47 orang per menit.
- Dimensi Politik yaitu keadaan mereka yang tidak punya suara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasibnya sendiri (*lack of voice*).
- Dimensi Sosial yaitu keadaan mereka yang berada pada lapisan bawah pada skala penilaian masyarakat (*lack of status*).
- Dimensi Psikologi yaitu keadaan mereka yang kurang percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain (*lack of self-confidence*).

Lebih lanjut W.I.M. Poli menganjurkan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dimulai dari dimensi tertentu sebagai *entry-point*, tetapi harus dipadukan dengan dimensi lainnya. Penanggulangan kemiskinan dari luar harus dipadukan dengan usaha dari dalam diri subyek yang bersangkutan (kelompok miskin).

Laderich sebagaimana dikutip oleh Ahmad Erani Yustika (2007), mengemukakan konsepsi kemiskinan dalam 4 perspektif: (a) pendekatan moneter yakni melihat kemiskinan sebagai kekurangan individu untuk mencapai tingkat konsumsi (pendapatan) secara minimum, yang biasanya diukur lewat garis kemiskinan, melalui pendekatan ini kesejahteraan diukur dari total konsumsi (kalori) yang dinikmati oleh individu, yakni diukur dari data pengeluaran atau pendapatan, sehingga individu yang memiliki pengeluaran atau pendapatan di bawah level minimum (garis kemiskinan) tergolong sebagai warga miskin. Pendekatan ini diterima secara populer, baik pada level domestik maupun internasional, salah satunya karena alasan mudah

untuk diterapkan dan gampang dicarikan jalan keluarnya. b) pendekatan kemampuan (*the capability approach*); pendekatan ini salah satu pionernya adalah Amartya Sen, menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilihat sebagai ekspansi dari kemampuan manusia (*human capabilities*), bukan sekadar memaksimalkan kegunaan (*utility*) atau produksi atas kegunaan itu, yakni pendapatan. Pendekatan ini menolak konsep pendekatan moneter dan lebih memfokuskan kepada indikator kebebasan (*freedom*) untuk menafkahi nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Dalam kerangka konseptual ini, kemiskinan didefinisikan sebagai pencabutan/kehilangan (*deprivation*) kemampuan atau kegagalan individu untuk mencapai kemampuan dasar/minimal, di mana kemampuan dasar (*basic capabilities*) tersebut tidak lain adalah kapabilitas untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang penting dari individu agar memperoleh level kecukupan hidup yang minimal (*minimally adequate levels*). Beberapa indikator yang digunakan dalam pendekatan ini adalah: harapan hidup, kesehatan, ketangguhan tubuh, perasaan (imajinasi), emosi, dan afiliasi (interaksi sosial dan perlindungan dari diskriminasi). c) Pendekatan pengucilan sosial (*social exclusion*); pendekatan ini populer di negara-negara maju untuk mendeskripsikan terjadinya proses marginalisasi dan pencabutan hak-hak dasar ekonomi. Meskipun kelihatannya hal ini muskil, tetapi dalam realitasnya masih sering terjadi di negara maju yang telah menyediakan kesejahteraan secara komprehensif. Secara lebih spesifik, komunitas Uni Eropa misalnya mendefinisikan pengucilan sosial ini sebagai proses di mana individu atau kelompok secara menyeluruh atau parsial dikucilkan dari keterlibatan penuh (*full participation*) dalam masyarakat di mana mereka hidup. Di negara maju, definisi tersebut diterjemahkan secara aplikatif melalui variabel-variabel pengukuran semacam pengangguran, akses terhadap perumahan, pendapatan minimum dan kontak sosial, dan keterbatasan kewarganegaraan (*lag of citizenship*) atas hak-hak demokratis. Meskipun pendekatan ini populer di negara maju, tetapi sebagian negara berkembang juga sudah mengadopsinya seperti India, Venezuela, Tanzania, Tunisia, Kamerun, dan Thailand (d) Perspektif metode partisipatif (*participatory methods*); selama ini baik pendekatan moneter maupun kemampuan, melihat kemiskinan sebagai soal yang selalu

didefinisikan dari pihak luar (*externally imposed*), tanpa pernah melihat kemiskinan dari perspektif kaum miskin sendiri (*view of poor people themselves*). Pendekatan ini yang diinisiasi oleh Chambers, bertujuan untuk merombak dan mengubah praktik turunturun tersebut dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan untuk mendefinisikan kaum miskin dan besaran (*magnitude*) kemiskinan. Konsep penilaian kemiskinan partisipatif (*PPA/participatory poverty assessment*) ini diadopsi dari konsep "*participatory rural appraisal*" (PRA), yang didefinisikan sebagai metode mamampukan masyarakat lokal untuk berbagi, merencanakan, dan bertindak. Secara praktikal, pendekatan ini dibagi dalam tiga kategori yakni: (1) diasosiasikan dengan penentuan diri dan pemberdayaan; (2) diasosiasikan dengan peningkatan efisiensi program, dan (3) Menekankan pada pembelajaran yang saling menguntungkan. Tentu saja pendekatan yang terakhir ini lumayan rumit untuk diaplikasikan karena menyangkut aspek yang multiragam, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lokalitas lingkungan politik. Tetapi kecenderungan model ini sekarang mulai intensif dikerjakan karena dipandang pendekatan-pendekatan terdahulu gagal untuk menuntaskan persoalan kemiskinan secara meyakinkan.

Berusaha untuk mengetahui usaha dari diri subjek (yang miskin) tersebut, maka penerima nobel ekonomi dari Bangladesh yakni Prof Dr. Muhamad Yunus dengan mendengarkan suara hatinya dan mendengar suara hati orang disekitarnya yang miskin. Mohamad Yunus merubah cara pandang dari burung di ketinggian angkasa, menggantikannya dengan cara pandang se ekor cacing yang berusaha menemukan apapun yang ada di depan dirinya; membaunya, merabanya, untuk menentukan apakah ada sesuatu yang dapat dikerjakan. Maka dia pun berjumpa dengan seorang wanita yang miskin tetapi pembuat kursi bambu, yang ternyata penghasilannya per hari dari membuat bambu tidak melebihi 2 sen dollar sehari, padahal si wanita menghasilkan kursi bambu yang sangat indah. Wanita ini menjelaskan bahwa karena ia tidak mempunyai uang untuk membeli bambu (bahan baku) yang dibutuhkannya, ia harus meminjam uang dari seorang pedagang, dan terikatlah wanita ini pada pedagang dimana ia harus menjual kursinya pada pedagang tersebut dengan harga yang ditentukan oleh sang pedagang. Si wanita ini tidak dapat keluar dari lingkaran

kemiskinan yang sudah diciptakan oleh sang pedang dan inilah alasan Mohamad Yunus tergerak hatinya untuk berbuat meminjamkan uangnya dan menjadi besar sampai mendirikan Bank Pedesaan (Grameen Bank).

Dalam konteks pembangunan maka konsep pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan sebagaimana dalam deklarasi PBB yang mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses ekonomi, sosial, kultural dan politik yang komprehensif, yang bertujuan tercapainya perbaikan terus menerus kesejahteraan seluruh penduduk dan individu.... yang memungkinkan terwujudnya semua hak dan kemerdekaan dasar manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tercapainya kemandirian subjek pembangunan, untuk memenuhi kebutuhannya, dan tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Dalam Buku Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga oleh Michael P. Todaro (1998) mengemukakan bahwa tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara dari sudut pandang ekonomi tergantung pada tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara tetapi selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian sebaliknya, seberapa apa pun distribusi pendapatan, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas.

Pada masa orde baru khususnya pada tahun 1976-1996, berdasarkan data BPS porsi penduduk miskin di Indonesia menurun drastis menjadi hanya 11,3% penduduk dari data tahun 1970 yang berada pada porsi penduduk miskin 60% penduduk. Namun ketika terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1997, maka pada tahun 1998 angka kemiskinan ini kembali meningkat tajam menjadi 39,1% dari total penduduk Indonesia pada waktu itu berjumlah 210 juta jiwa. Pada tahun 1996-1998 jumlah penduduk miskin meningkat dari 22,5 juta menjadi 79,4 juta jiwa atau suatu pertambahan sekitar 57 juta jiwa. Kemudian dilihat dari kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga sangat memprihatinkan. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin di perkotaan

7,2 juta atau sekitar 9,7% penduduk. Jumlah ini meningkat menjadi 22,6 juta jiwa atau sekitar 29% tahun 1998. Sedangkan di pedesaan meningkat dari 15,3 juta jiwa (12,3%) tahun 1996, menjadi 56,8 juta jiwa (45,6%) pada tahun 1998. (M. Rizal Ismail, 2002, dalam buku Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia).

Hal ini dikatakan juga oleh Riant Nugroho D (2003; Reinventing Pembangunan) bahwa Indonesia menjelang abad 21 ibarat didepak dari surga, karena pujian The Asian Economic Miracle dari Bank Dunia ternyata omong kosong yang memuji Indonesia dengan Pendapatan per kapita sudah mencapai US\$ 1.100, ternyata pada tahun 1998 terpuruk menjadi negara dengan pendapatan per kapita US\$ 350. Hal ini berarti pada tahun 1998 kita dikelompokkan pada negara miskin. Dilanjutkannya bahwa prosentasi penduduk miskin kembali pada sekitar tahun 1970 berkisar 40%. Pembangunan selama orde baru (32 tahun) seakan tidak ada gunanya.

Pada tahun 2001, pemerintah baru dengan Presiden Megawati membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan tujuan menurunkan penduduk miskin. Berbagai subsidi mengucur kembali, mulai yang bersifat pendukung hingga pergerakan ekonomi melalui berbagai kredit untuk kelompok miskin. Sekarang ini kita disuguhkan dengan kelompok miskin yang terima-terima uang (Gakin dibidang kesehatan, Bantuan Langsung Tunai/BLT bagi keluarga miskin, dll) yang semuanya dikemas oleh pemerintah sebagai program dari atas/pemerintah. Teringatlah kita pada anjuran Keynes untuk tetap adanya campur tangan pemerintah ketika keadaan ekonomi menjadi sulit seperti yang dialami pada masa krisis ekonomi tahun 1930-an. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) memang menjadi pilihan kita sejak orde lama dengan konsep Hatta seorang ekonom terkemuka Indonesia pada masa kemerdekaan. Dalam perkembangannya konsep ini juga dimasa orde baru (Soeharto) menjadi pilihan namun basis dari kebijakan ini adalah tetap melegitimasi kapitalisme sebagai basis ekonomi dengan melunakkan dampaknya dengan menerapkan subsidi. Hasilnya tetap terjadi kesenjangan yang sangat mengawatirkan, dan ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Dengan penerapan kapitalis maka yang terpinggirkan diberi subsidi yang ternyata tidak menyembuhkan tetapi

tetap sebagai luka permanen yang tidak sembuh-sembuh. Mungkinkah Pemerintah sebagai *top down* (pemimpin) tidak mendengar suara hati mereka yang terpinggirkan ini? apalagi melibatkan mereka dalam usaha program subsidi ini?

LB. Wirawan, Sukiidin dan Basrowi dalam bukunya *Perencanaan dan Strategi Pembangunan* (2001) mengemukakan bahwa Berbagai program yang diterapkan selama ini cenderung bersifat *top down* dan partisipasi masyarakat miskin dalam berbagai program masih sangat rendah. Program penanggulangan kemiskinan cenderung dirancang dengan asumsi bahwa orang miskin tidak mampu menolong dirinya sendiri. Kemiskinan hanya dipandang sebagai gejala rendahnya kesejahteraan. Kenyataannya kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat multi-dimensional.

Wirawan, dkk., mengusulkan tiga strategi dalam kerangka membangun keberdayaan individu yang miskin, yaitu: a) Pemberdayaan waktu artinya pemborosan waktu yang sering dilakukan oleh masyarakat miskin diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif; b) Pemberdayaan usaha ekonomi, artinya diarahkan pada terbentuknya jaringan usaha ekonomi antar anggota masyarakat, *networking* ini amat strategis dalam memperkokoh basis ekonomi kerakyatan; c) Pemberdayaan psikologi, artinya penumbuhan keyakinan diri orang miskin untuk dapat berkembang.

Penanggulangan kemiskinan hendaknya melihat pada potensi yang dimiliki kelompok miskin dan menghilangkan berbagai hambatan yang membatasi mobilitas sosial, bukan sekedar memberi ikan untuk dimakan tetapi memberi kail. Dengan demikian konsep pemberdayaan pada masyarakat miskin yang ditawarkan adalah konsep *top-down* dan sekaligus *bottom-up* yang dirancang dengan memperhatikan seluruh dimensi kehidupan mereka yang miskin.

Melihat peta warga miskin yang kebanyakan berada pada masyarakat yang memiliki usaha yang kecil-kecil dan sulit untuk berkembang dan umumnya berada di pedesaan dibanding dengan usaha-usaha besar yang berbentuk konglomerasi, maka arah pembangunan ekonomi ke depan haruslah menyediakan ruang yang memadai bagi terakomodasinya nilai-nilai lokal, kultur setempat, dan sejarah masyarakat yang bersangkutan. Adanya potensi disetiap wilayah (keragaman potensi) dari segi sumber daya alam,

sumberdaya manusia, dan lingkungan diberi makna dalam model pembangunan yang akan diterapkan. Oleh sebab itu, Korten David (1984) dan juga Sjahrir (1988) memberi pengertian yang lebih jauh tentang pembangunan yang berdimensi kerakyatan, yaitu rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola swasembada maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan. Dalam pemikiran ini Ahmad Erani Yustika (2007) memberi 2 (dua) hal yang utama terhadap pemikiran ini: a) Partisipasi rakyat yang merupakan unsur mutlak dalam pembangunan yang berdimensi kerakyatan, dalam hal ini tugas pemerintah hanyalah sebagai fasilitator yaitu menciptakan keadaan yang mendorong inisiatif rakyat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. b) Apa yang dikehendaki rakyat merupakan pilihan terbaik bagi negaranya, baik yang menyangkut tujuannya maupun caranya untuk mencapai tujuan.

Teori-teori ekonomi klasik atau konvensional yang bertumpu pada paradigma persaingan bebas liberal terbukti bahwa bangsa Indonesia tidak mampu dan tidak berdaya mengembangkan politik ekonomi yang menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya sudah cukup lama ada aliran baru teori ekonomi yang berbeda yang lebih mengandalkan upaya-upaya manusia untuk bekerjasama (*cooperation*) dan bukan persaingan (*competition*). Di sejumlah negara kapitalis di Eropa terutama di sektor pertanian berkembang organisasi-organisasi koperasi (*cooperative*) yang mengandalkan kerjasama anggota untuk memenangkan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang tidak berbentuk koperasi. Bung Hatta yang pakar ekonomi dan sekaligus perumus pasal-pasal kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 menganjurkan koperasi sebagai bangun/bentuk perusahaan yang sesuai dengan bentuk usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Mubyarto, 2007).

Bahkan penerapan ekonomi klasik murni, bukan hanya memunculkan kompetisi yang tinggi, tetapi dapat memunculkan konflik. Sebagaimana Deliarnove (2006) mengemukakan bahwa adanya kelangkaan sumber daya di satu pihak dan keinginan manusia yang tidak terbatas di pihak lain memaksa pelaku-pelaku ekonomi melakukan pilihan. Dalam analisis ekonomi murni, semua masalah ekonomi diselesaikan oleh pasar. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah

ekonomi dan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi akan menimbulkan trade-off di antara berbagai alternatif yang ada. Ini berarti bahwa yang timbul kemudian tidak hanya kompetisi, tetapi juga konflik, sebab apapun pilihan yang diambil pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan.

Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Dikatakan demikian, sebab dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik. Kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari kelemahan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya (Rachbini, 2001).

Douglas C. North (1990) sebagai penerima hadiah nobel ekonomi tahun 1993, dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Kelembagaan generasi baru, meneruskan tokoh-tokoh ekonomi kelembagaan sebelumnya yaitu: J.R. Commons, Thornstein Veblen, dan Gunnar Myrdal dari Swedia, memberi tekanan pada ekonomi kelembagaan sebagaimana dibedakan dari ekonomi neoklasik ortodoks adalah bahwa manusia menciptakan dan menggunakan lembaga-lembaga tertentu untuk memecahkan berbagai konflik ekonomi didalam masyarakat. Jika ekonomi neoklasik ortodoks percaya bahwa persaingan bebas akan menghasilkan "harmoni" dan efisiensi, maka ekonomi kelembagaan mencari kemungkinan-kemungkinan tindakan bersama (*collective action*) dan kerjasama antar manusia (*human cooperation*) untuk mengatasi konflik-konflik sosial-ekonomi. Namun Douglas C. North memberikan prasyarat agar lembaga-lembaga ekonomi terlebih bentukan pemerintah di negara-negara dunia ke tiga (walaupun Douglas North anti intervensi pemerintah) harus efisien dan mampu membuat masyarakat atau rakyat produktif, Sogok (Korupsi) kepada pemerintah dalam mempercepat urusan bisnis hendaknya dihapus karena akan memberi dampak pada harga produk yang semakin tinggi (sogok merupakan biaya bagi pengusaha).

Dalam kaitan dengan budaya bangsa Indonesia yang akan mempengaruhi pada perilaku ekonomi dan bisnis, maka Dennis De Tray (1999) mengkritik para

ekonom di negeri ini yang kurang memberi perhatian pada peranan lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat, karena perhatian hanya tertuju pada indikator-indikator ekonomi makro kuantitatif (dapat diukur dengan angka-angka) seperti angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan cadangan devisa yang dikenal sebagai fundamental ekonomi.

Mengembangkan ekonomi rakyat yang sebenarnya merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang bisa diandalkan sering kurang disadari, terutama sejak terjadinya proses konglomerasi ekonomi mulai tahun 1987/1988 dimana sering orang menyindir bahwa barangkali memang konglomeratlah dan bukan koperasi, wadah kegiatan ekonomi rakyat, yang merupakan sokoguru ekonomi nasional. Dan kenyataan bahwa ekonomi rakyat kuat daya tahannya, sedangkan sebaliknya perusahaan besar sering keropos dan bisa merepotkan pemerintah, telah terbukti oleh kasus krisis Pertamina tahun 1975, kasus Indocement tahun 1985, ambruknya Bank Summa akhir tahun 1992, dan terakhir krisis ekonomi sejak tahun 1997 (Mubyarto, 2007). Banyak perusahaan besar dan Bank-Bank yang mengalami kolaps pada krisis ekonomi 1997 sedangkan ekonomi rakyat bertahan hidup ditengah krisis yang melanda Indonesia. Sejalan dengan kondisi usaha kecil yang nota bene sebagai ekonomi rakyat kecil selalu bertahan disaat krisis berlangsung, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hudyanto (2005) bahwa dimasa krisis yang membelit, usaha kecil selalu dipuji. Pujian itu secara umum menekankan bahwa usaha kecil lebih tahan dan mampu berkembang di masa krisis, banyak usaha kecil yang tahan banting dan lebih fleksibel menyesuaikan dengan krisis.

Lebih lanjut Mubyarto mengatakan bahwa menelantarkan ekonomi rakyat (kecil) akan berakibat fatal dalam jangka panjang karena justru perusahaan-perusahaan besar bisa cepat mengeluh tentang sudah mulai jenuhnya pasar dalam negeri dan selanjutnya mulai minta kemudahan-kemudahan ekspor bagi pemasaran barang-barangnya keluar negeri, karena harga jual barangnya tidak mampu bersaing dengan barang-barang negara pesaing di pasar dunia. Dalam hal yang demikian, seharusnya disadari bahwa kesalahan pokoknya justru karena kegagalan kita untuk meningkatkan secara cepat daya beli rakyat. Inilah yang selalu diingatkan Hatta, bahwa tugas utama

pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan daya beli atau tenaga beli rakyat.

Selanjutnya mengkaji pemberdayaan masyarakat dimulai dari ketika terjadinya depresi ekonomi yang hebat di tahun 1930-an, muncullah John Maynard Keynes dengan menawarkan paradigma pembangunan yang memadukan *visible* dan *invisible hand*, dari aliran keynes ini turut melahirkan Bank Dunia dan IMF serta memprakarsai ITO.

Dalam penerapan resep Keynes akibat terjadinya pengangguran (*unemployment*) yang dilihat pada *agregat demand* tidak sama dengan *aggregate supply*, maka diterapkanlah kebijaksanaan (campur tangan pemerintah) dengan menggerakkan sisi moneter dan fiskal. Penerapan ini dari Amerika dan meluas sampai sebagian besar negara di dunia setelah PD II. Dalam teori pembangunannya juga diperkuat oleh teori lepas landas dari Rostow. Banyak negara yang turut menerapkan resep ini termasuk Indonesia, disinilah melahirkan apa yang namanya "*Big Government*" blok barat, yang dalam materi Yunus Zain (2007) mengemukakan alasan yang mendorong sampai ke arah "*Big Government*" baik di negara maju maupun negara berkembang adalah:

Negara Maju:

- Trauma depresi ekonomi dunia tahun 1929.
- Keberhasilan penerapan resep Keynes sejak PD II sampai tahun 1960-an.
- Meningkatnya perang dingin Timur-Barat, yang mendorong meningkatnya anggaran belanja pemerintah negara adidaya.
- Masuknya unsur negara berkembang dalam politik Timur-Barat, sehingga mendorong pemberian bantuan luar negeri yang meningkatkan anggaran belanja pemerintah baik yang memberi bantuan maupun yang menerima bantuan.

Negara Berkembang:

- Ketinggalan pembangunan dibanding dengan negara maju.
- Pembangunan dengan resep negara maju berdasarkan pengalaman pasca PD II.
- Perlombaan konsep pembangunan blok timur-barat; *Big Government* blok barat, dan sentralisme blok timur (*big government* blok timur).
- Sisa feodalisme dalam bentuk baju baru.

Dalam penerapan strategi pembangunan dengan penerapan *big government*, maka unsur G (pengeluaran

pemerintah) kian membesar dalam pembangunan dan melegitimasi dengan melahirkan begitu banyak aturan yang pada akhirnya memunculkan masalah baru yang memuncak pada tahun 1970-an dengan terjadinya stagnasi ekonomi dan inflasi yang tinggi karena *deficit spending* pemerintah, inilah yang disebut stagflasi ditahun 1970-an.

Sebagai akibat dari stagflasi di tahun 1970-an, maka terjadilah reaksi terhadap strategi pembangunan "*big Government*" yang lebih menitik beratkan pembangunan dari aspek ekonomi saja dengan peran pemerintah yang kental, lahirlah konsep paradigma pembangunan pada tahun 1980-an yaitu: "*Reinventing Government*" dengan tiga mitra pembangunan yaitu pemerintah, pelaku bisnis (swasta), dan masyarakat dalam hal ini LSM. Sedangkan pada dunia bisnis dikenal dengan istilah "*Reengineering the Corporation*". Dari konsep pembangunan inilah muncullah konsep pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan *global civil society* dan memainkan peranan sebagai *watchdog* terhadap penyalah-gunaan kekuasaan. Pembangunan sebagai suatu proses dari seluruh aspek kehidupan (*multidimensional*) yang pada akhirnya tertuju pada terpenuhinya kebutuhan yang asasi dari manusia. Pemahaman dari pembangunan ini sejalan dengan yang dideklarasikan PBB yang memberi arti pembangunan sebagai suatu proses ekonomi, sosial, kultural dan politik yang komprehensif, yang bertujuan tercapainya perbaikan terus menerus kesejahteraan keseluruhan penduduk dan individu... yang memungkinkan terwujudnya semua hak dan kemerdekaan dasar manusia.

Pada tahun 1990-an dikembangkanlah Pembangunan Berkelanjutan, akibat dari adanya kenyataan terbatasnya daya dukung sumber daya alam terhadap tuntutan pembangunan. Sumber daya alam di suatu negara mendasari kehidupan segenap penduduknya. Michael P Todaro (1998) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan kualitas kehidupan umat manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Dengan demikian, berkelanjutan memberi arti pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Akhirnya W.I.M. Poli (1994), memberi arti pembangunan berkelanjutan adalah:

- Kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya.
- Dengan menggunakan sumber daya yang ada pada diri dan lingkungannya.
- Tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan
- Menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi
- Dengan atau tanpa bantuan dari luar,
- Di dalam batas hukum dan HAM yang universal.

Dari batasan pembangunan berkelanjutan diatas terkandung maksud bahwa adanya pemberdayaan masyarakat lokal dengan memperhitungkan sumber daya yang ada pada diri dan lingkungannya dan dengan atau tanpa bantuan dari luar.

Mubyarto (2007) mengutip Ginanjar Kartasasmita mengemukakan pengertian pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Konsep pemberdayaan telah dicoba diterapkan melalui pelaksanaan program nasional penanggulangan kemiskinan berdasar Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai program EDT. Hambatan besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dirumuskan oleh Ginandjar dalam bentuk bias-bias, yaitu penggunaan paradigma (cara pandang) yang keliru tentang karakteristik penduduk miskin, motivasi mereka, lembaga-lembaga yang dibentuk dan mengatur kehidupan mereka, dan perilaku ekonomi dan sosial-budaya yang diterapkannya. Bias-bias itu adalah :

- Dimensi rasional pembangunan lebih penting ketimbang dimensi moral.
- Pendekatan pembangunan dari atas lebih unggul ketimbang pengalaman dan aspirasi dari bawah.
- Bantuan materiil lebih diperlukan ketimbang keterampilan teknis dan manajerial.
- Teknologi dari luar lebih ampuh ketimbang teknologi yang sudah dikenal setempat.
- Lembaga-lembaga yang dikembangkan rakyat setempat tidak efisien dan efektif.
- Masyarakat tidak tahu apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya.
- Orang miskin menjadi miskin karena bodoh dan malas.
- Setiap investasi harus cepat menghasilkan.

- Pertanian sebagai sektor tradisional tidak produktif dan tidak menguntungkan.
- Akses masyarakat desa terhadap sumber dana sangat terbatas dan tidak dikembangkan karena dianggap beresiko tinggi.

Dari bias-bias di atas, maka W.I.M Poli, Agustinus Salle, dan Purnomo (2006) mengingatkan dalam tulisan mereka tentang cerita "monyet tolong ikan" dan "sapi makan baju". Konon di negeri Antah-berantah, ada seekor monyet yang bercengkerama dengan teman-temannya, beberapa ekor ikan. Sang monyet berada di sebuah pohon, sedangkan teman-temannya berada di dalam sungai, tepat di bawah pohon di mana sang monyet berada. Karena berada di tempat yang tinggi, sang monyet dapat melihat datangnya banjir di kejauhan. Ia segera mengingatkan kawan-kawannya tentang bahaya yang sedang mendekat. Tidak hanya mengingatkan, ia juga dengan sigap terjun ke dalam sungai, menangkap teman-temannya dan membawanya ke tempat yang aman dan kering di atas pohon. Maksud dan tindakan yang "baik" ini berakhir dengan matinya ikan-ikan tersebut, yang menimbulkan kesedihan dan penyesalan pada sang monyet. Pesan yang hendak disampaikan melalui perumpamaan ini ialah : maksud baik menolong orang lain belum cukup, jika pihak yang menolong tidak bertanya dan tidak tahu tentang kebutuhan pihak yang hendak ditolong.

Konsep CBD untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, secara konseptual sebagaimana dirumuskan oleh Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri (2007) sebagai berikut: (1) Untuk mempertahankan eksistensinya, setiap program CBD memerlukan *break even* dalam setiap kegiatan yang dikelola. (2) Partisipasi masyarakat, khususnya para binaan, merupakan elemen utama dari model CBD untuk program pemberdayaan ekonomi rakyat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini diperlukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program, sampai dengan pengembangannya. (3) Kegiatan pelatihan keterampilan kepada para binaan merupakan satu paket yang tidak terpisahkan dengan keberadaan program bantuan modal usaha. (4) Dalam mengimplementasikan konsep CBD, tidak dapat dihindari juga harus melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah dan pusat yang terkait, maupun pihak swasta. Partisipasi dari pihak pemerintah dalam hal ini, antara lain memeberikan

kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap resources yang dimiliki. Sementara partisipasi dari pihak swasta sangat diperlukan, utamanya dalam bentuk bantuan dana. 5) Seleksi calon binaan harus dilakukan secara teliti, agar keberadaan mereka tidak saja difungsikan sebagai bukti dari partisipasi masyarakat, tetapi juga secara kualitatif, peran serta para binaan betul-betul dapat mendukung keberhasilan program. 6) Kegiatan pembinaan pasca proyek harus dilakukan karena ia tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan kualitas partisipasi binaan, tetapi juga menjadi variabel penentu bagi pencapaian tujuan program, maupun dalam pengembangan hasil yang telah dicapai. 7) Untuk mengaplikasikan konsep CBD tersebut perlu dibentuk *community based development organization* (CBDO). 8) CBDO tidak hanya mengelola program-program yang bersifat *non-profit oriented*, tetapi juga mengelola dan mengembangkan usaha-usaha yang bersifat *profit oriented*.

Lebih lanjut dalam pemberdayaan masyarakat yang menindak lanjuti program IDT di 88 desa miskin di Propinsi Sulawesi Tengah dan Irian Jaya tahun 1997-98, maka Mubyarto (2007) mengemukakan lima misi utama program pemberdayaan masyarakat yang menjamin tercapainya hasil yang baik. Kelima misi tersebut saling terkait, yaitu: 1) Penyadaran; 2) Pengorganisasian; 3) Kaderisasi pendamping; 4) Dukungan Teknis; 5) Pengelolaan Sistem.

Joseph Stiglitz dan Boris Pleskovic (1999), mengingatkan para ekonom yang menjadi penasihat pemerintah di negara-negara berkembang untuk tidak terlalu kaku berpegang pada ideologi neoliberal dari Washington Concensus, tetapi perlunya ekonom negara-negara berkembang menganut ideologi negara dan bangsanya. RCC dipuji Stiglitz karena tidak melaksanakan privatisasi secara tergesa-gesa, maka harus disimpulkan hadirnya ideologi peranan negara dalam perekonomian nasional RRC. Jadi himbauan Stiglitz bahwa sebenarnya ada ideologi nasional dari setiap negara yang berbeda-beda dan harus dihormati oleh para penasihat ekonomi tersebut, dan dengan demikian pemberdayaan masyarakat di Indonesia berpegang teguh pada ideologi Pancasila yang dalam sistem ekonomi yang dianutnya berhak mengacdu pada ideologi tersebut. Demikianlah Soekarno dan Hatta menentang sistem ekonomi kapitalisme dengan cara memberdayakan rakyat dan memberdayakan

ekonomi rakyat, dengan mempersatukan ekonomi rakyat dalam wadah organisasi koperasi, serta dengan menyusun sistem ekonomi usaha bersama yang berasas kekeluargaan (Mubyarto, 2007).

Lebih jauh Cecilia Luttrell and Sitna Quiroz (2007) mengemukakan dimensi-dimensi pemberdayaan yang mencakup: a) pemberdayaan ekonomi, b) pemberdayaan manusia dan sosial; c) pemberdayaan politik; dan d) pemberdayaan budaya.

Masyarakat nelayan di Kabupaten Minahasa selatan yang hidup di pesisir pantai dan menggantungkan hidupnya pada laut dalam observasi penulis masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan terutama dari aspek ekonomi. Oleh sebab itu penelitian ini menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Dengan hipotesis pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh yang signifikan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dengan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Minahasa Selatan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kuantitatif dengan memberi gambaran tentang pengaruh pemberdayaan masyarakat nelayan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan mengelaborasi variabel-variabel:

- Variabel X: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
  - Variabel Y: Penanggulangan Kemiskinan
- Sedangkan deskriptif kualitatif mengangkat domain-domain yang akan ditelusuri yaitu:
- Program-program pemerintah yang dilakukan di pesisir pantai di Kabupaten Minahasa.
  - Bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat nelayan
  - Terbentuknya organisasi/kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat/nelayan.
  - Partisipasi masyarakat nelayan
  - Usaha-usaha nelayan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Keluarga-keluarga nelayan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan sebanyak 64 kelompok untuk 720 nelayan. Sedangkan sampel adalah mengambil 10% dari jumlah populasi sebesar 72 unit sampel dengan

memperhatikan sebaran unit sampel pada desa-desa dan kelurahan-kelurahan atau dengan teknik proporsional random sampling, artinya diambil secara acak dengan memperhatikan proporsional untuk desa dan kelurahan.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- Observasi; Peneliti akan turun melakukan pengamatan pada objek penelitian di lapangan (kelompok-kelompok nelayan), dengan teknik "on the spot" artinya langsung mencatat apa yang terjadi pada pengamatan yang sedang berlangsung pada objek yang diamati, dikombinasikan dengan observasi dengan menggunakan kata-kata kunci (*key words*).
- Wawancara Mendalam; dilakukan kepada stakeholders yang terlibat agar menghasilkan data-data yang akurat.
- Kuesioner, dengan mengedarkan angket kepada responden sebagai unit sampel yang representatif terhadap populasi yaitu nelayan di Kabupaten.

Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif menggunakan analisis domain domain-domain pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan. Sedangkan secara deskriptif kuantitatif menggunakan analisis regresi dan korelasi.

## HASIL

Berdasarkan uji regresi korelasi diatas, maka diperoleh bahwa  $r = 0,92$  dengan  $r^2 \text{ adjust} = 0,85$  artinya hubungan antara variabel X dengan Y memiliki hubungan yang positif dan tinggi dan terjadinya penanggulangan kemiskinan pada masyarakat nelayan 85% ditentukan oleh faktor pemberdayaan masyarakat nelayan, dan 15% ditentukan oleh faktor lainnya.

Dari analisis diatas, diperoleh persamaan regresi  $v = 7,26 + 0,84 X$ . artinya penambahan 1 unit X (pemberdayaan masyarakat nelayan) akan mengakibatkan pertambahan 0,84 unit Y (penanggulangan kemiskinan).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.924 <sup>a</sup>	.855	.852	1.22164

a. Predictors: (Constant), VAR00001

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	613.532	1	613.532	411.103	.000 <sup>a</sup>
	Residual	104.468	70	1.492		
	Total	718.000	71			

a. Predictors: (Constant), VAR00001

b. Dependent Variable: VAR00002

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.259	1.507		4.818	.000
	VAR00001	.849	.042	.924	20.276	.000

a. Dependent Variable: VAR00002

## PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap *key person*, (wawancara pada Bpk S, dan ST sebagai ketua-ketua kelompok nelayan) bahwa dari pemberdayaan masyarakat nelayan dengan program bantuan pemerintah sangat mengangkat taraf hidup masyarakat nelayan. Bantuan perahu pelang, perahu katinting dan ada bantuan motor tempel sangat membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Namun dengan masuknya bantuan alat tangkap Giob dan Pajeko membuat bantuan ini tidak dapat menyaingi usaha nelayan yang sudah menggunakan Giob dan Pajeko.

Hasil wawancara mengenai keterlibatan/partisipasi nelayan dalam kelompok disesuaikan dengan spesialisasi masing-masing nelayan yang dikelompokkan dalam 3 job yaitu:

- Tonaas; dengan keterlibatannya sebagai pemegang komando ketika berlayar dan mengarahkan perahu tangkap serta soma sehingga mendapatkan hasil tangkap yang banyak. Tonaas memiliki pengetahuan tentang cuaca, pergerakan laut dan tempat-tempat dimana ikan berkumpul atau pencarian yang banyak.
- Masinis; bertanggungjawab terhadap mesin/motor perahu yang digunakan, ketersediaan bahan bakar dan pada saat mana mesin hidup dan saat mana mesin dimatikan, dll yang berhubungan dengan mesin perahu.
- Masanae; para nelayan yang memiliki keterampilan menebarkan soma atau jaring, mengangkat soma, dan turut memelihara soma dan perahu, serta terampil dalam meletakkan rumpon atau rakit ditengah laut.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, ternyata berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk bantuan para nelayan tangkap, nelayan budi daya, dan nelayan pengumpul (tibo-tibo) diberdayakan agar mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan yang selama ini dijalani. Dan lewat bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah ternyata ada yang efisien dan efektif melaksanakannya, dan ada pula nelayan yang tidak efisien dan efektif mengelola bantuan tersebut. Ada Nelayan yang berperilaku mencari hari ini dihabiskan hari ini juga, pola konsumsi yang berlaku dalam

keluarga nelayan yang tidak ingin melakukan tabungan untuk hari-hari esok.

Nelayan yang berkelompok dan mendapat bantuan alat penangkap ikan berupa giob dan pajeko lebih cepat dan efektif dalam mengurangi kemiskinan para nelayan. Hasil wawancara mendalam peneliti dan penelusuran langsung ke rumah-rumah para nelayan yang berkelompok dengan usaha penangkapan ikan giob dan pajeko ternyata sudah dapat merenovasi rumah menjadi layak huni, dapat menyekolahkan anak-anak mereka, dan tingkat kesehatan keluarga sudah dapat terjamin.

Dari analisis kuantitatif dengan analisis regresi dan korelasi, ternyata pemberdayaan masyarakat nelayan berpengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan yang dapat dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0,84 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 20,276 dan jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada  $\alpha = 0.05$  sebesar 1,96 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan demikian hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang positif pemberdayaan masyarakat nelayan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan, terbukti dan diterima.

Dalam penelusuran peneliti berdasar hasil wawancara, ternyata nelayan yang memperhatikan peningkatan alat tangkap dari perahu pelang ke perahu katinting mulai ada perubahan dalam pencarian ikannya walaupun masih sedikit pertambahan pendapatannya. Namun bagi nelayan yang sudah berkelompok dan meningkatkan alat tangkapnya dari katinting ke Giob dan Pajeko mengalami peningkatan kesejahteraan karena dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis ternyata mereka sudah memperoleh pendapatan untuk masanae saja per nelayan dalam satu kali melaut sudah memperoleh Rp400.000,- s/d 500.000,- bersih. Dengan demikian dalam sebulan jika ada 6 kali melaut sudah memperoleh sekitar Rp 3.000.000,- bersih.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Terdapat korelasi yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pemberdayaan masyarakat nelayan

dengan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Minahasa Selatan.

Lewat program pemberdayaan masyarakat nelayan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat menanggulangi kemiskinan para nelayan dengan catatan para nelayan dapat mengelolanya secara efisien dan efektif.

Para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan dan mampu meningkatkan alat tangkap mereka menjadi giob dan pajeko dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluar dari perangkap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari indikator kesejahteraan baik pendapatan yang meningkat, tempat tinggal yang layak, dapat menyekolahkan anak-anak dengan berpakaian yang layak, dan terjaminnya kesehatan di dalam keluarga.

#### Saran

Lewat penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut.

Proses pemberian bantuan oleh pemerintah lewat program pemberdayaan masyarakat nelayan, hendaknya dibantu per kelompok nelayan dengan bantuan alat tangkap yang lebih modern seperti pajeko.

Bagi nelayan hendaknya berkelompok dan membentuk aset bersama sehingga dapat mengadakan alat tangkap yang lebih modern, dan dapat melakukan usaha-usaha yang lebih komersial karena usaha pencarian ikan yang sudah di perairan laut yang luas dan dalam, sekali melaut saja sudah ada 2 hal yang teratasi yaitu pemenuhan kebutuhan ikan para nelayan di dalam keluarga dan aspek komersial yaitu banyaknya ikan yang dapat dijual di pabrik ikan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marsuki. 2006. *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- [www.sulut.go.id](http://www.sulut.go.id). 2003. Perikanan di Minahasa.
- [www.jateng.go.id](http://www.jateng.go.id). 2003. Ikan Laut oleh Ikhwan Sdrajat Sekda Provinsi Jawa Tengah.
- Todaro, M. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ismail, M. 1995. *Pemerintah dan Pasar dalam Pembangunan yang Berdimensi Kerakyatan*, FE-Universitas Brawijaya Malang.
- Mirdal, G. 1976. *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*, Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: PT Gramedia.
- Poli, W.I.M., dan Agustinus, S., Purnomo. 2006. *Suara Hati Yang Memberdayakan*. Gagasan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jayapura. Makassar: Penerbit Puistaka Refleksi.
- Poli W.I.M. 2007. *Modal Sosial Pembangunan; Gambaran dari Dua Distrik di Kabupaten Jayapura*, Hasanuddin University Press.
- Poli, W.I.M. 2007. *Filsafat Ilmu Ekonomi*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Yustika, A.E. 2007. *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*, BPFE-Universitas Brawijaya Malang.
- Riant, N.D. 2003. *Reinventing Pembangunan, Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- Wirawan, S., dan Basrowi. 2001. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan*. Jember: Universisty Press, Jember.
- Korten, D. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kumpulan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Sjahir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto. 2007. *Membangun Sistem Ekonomi*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Rachbini. 2001. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, Ekonomi Politik Kelembagaan: Mencari Jawaban Krisis Ekonomi dan Politik*, Volume 4 (3).
- North Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge.
- Tray, D.D. 1999. World Bank's lessons from Indonesian economic crisis, Jakarta Post, 14 April.